



Volume 26 No 1, Januari 2024

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Ukuran Optimal Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sudut Pandang Ekonomi

Yenni Del Rosa¹, Idwar², Zikri Alif³ dan Sinta Indriani⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas^{1,2,3,4}

email:yennidelrosa01@gmail.com¹

idwar68@unidha.ac.id²

zikrialif@gmail.com³

indrianisinta@gmail.com⁴

Abstract

Padang City, the capital of West Sumatra province, attracts residents from various regions in West Sumatra and beyond, leading to over urbanization without consideration of its economic viability. This study aims to determine the economically optimal size of Padang City. Secondary data from 2020-2022 including GRDP ADHB, indirect costs, public spending, population, density, and area were utilized. The research employed a library research method, focusing on 12 districts and 7 cities in West Sumatra, with Padang City as the sample through purposive sampling. Quantitative descriptive statistics were applied for data analysis. Findings reveal a negative correlation between population size and per capita expenditure. Calculations for Padang City's optimal size, considering minimizing per capita expenditure and maximizing GRDP, highlight variations in per capita expenditure. The optimal size corresponds to a population level where the city's per capita expenditure is minimized, enabling an increase in GDP per capita. However, the current population size falls below the optimal threshold, indicating potential for minimizing total government expenditure..

Keywords: optimal city, indirect costs, public spending, population, population density and area.

Abstrak

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, menjadi salah satu tujuan urbanisasi bagi penduduk dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan provinsi lain di Indonesia. Namun, urbanisasi tersebut seringkali terjadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan ukuran kota yang optimal secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ukuran optimal Kota Padang dari sudut pandang ekonomi. Data sekunder tahun 2020-2022 seperti PDRB ADHB, biaya tidak langsung, belanja publik, jumlah penduduk, kepadatan, dan luas wilayah digunakan dalam penelitian ini. Metode library research digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian mencakup 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan Kota Padang sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara jumlah penduduk dan pengeluaran per kapita. Penentuan ukuran kota optimal Kota Padang dilakukan dengan meminimalkan pengeluaran per kapita dan memaksimalkan PDRB. Ditemukan bahwa ukuran optimal kota Padang adalah ketika jumlah penduduknya sesuai dengan pengeluaran per

kapita pemerintah yang minimal, namun masih di bawah ukuran optimal untuk meningkatkan PDRB per kapita sehingga pengeluaran total pemerintah dapat diminimalkan

Kata kunci: kota optimal, biaya tidak langsung, belanja publik, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan luas wilayah.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dunia saat ini sudah sangat banyak, diprediksi mencapai 8 miliar jiwa. Urutannya sebagai berikut: Tiongkok dengan jumlah 1.45 milyar jiwa, India dengan jumlah 1.41 milyar jiwa, Amerika Serikat dengan jumlah 335.67 juta jiwa, Indonesia dengan jumlah 280.56 juta jiwa, dan Pakistan dengan jumlah 231.56 juta jiwa (Laporan PBB, 2021). Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke-4 dengan jumlah 275.77 juta jiwa. Sekitar 56.7% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 66.6% pada tahun 2035, sekitar 220 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2045, setara dengan 70% dari total populasi di tanah air (World Bank, 2022).

Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-11 dari populasi penduduk dunia dengan jumlah 5.664.988 jiwa, dengan komposisi penduduk perkotaan mencapai 70% - 90% (BPS, 2020). Urbanisasi di Indonesia termasuk tinggi di Asia, mencapai 56.7% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase urbanisasi per tahun di negara-negara lain yang memiliki jumlah penduduk padat seperti Tiongkok 64.72%, Filipina 46.7%, dan India 35.39% (World Bank, 2022). Lebih dari separuh populasi dunia tinggal di kota saat ini, dan diprediksi akan terus meningkat sebanyak 3 miliar jiwa pada tahun 2050.

Wilayah perkotaan berkembang karena urbanisasi selalu diikuti perkembangan teknologi transportasi dan informasi menghubungkan wilayah satu dengan lainnya dan pemekaran kota guna meningkatkan pergerakan penduduk dan komoditi baik sehingga

mendorong terbentuknya sistem perkotaan (Khisty & Lall, 2003). Urbanisasi berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar penduduk usia produktif tinggal di kota besar (Harahap, F.R, 2013 & Hidayati I, 2021). Terkonsentrasinya penduduk dan aktifitasnya di wilayah kawasan padat lebih tinggi daripada kawasan lain di sekitarnya (Sato & Yamamoto 2015) diikuti perluasan ruang kota dan peningkatan konsentrasi penduduk perkotaan (Merlin & Choay, 2005). Urbanisasi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk akibat perubahan sosial masyarakat (Davis K, 1995), peningkatan konsentrasi penduduk dan penggandaan konsentrasi (Tisdale, 1942).

Proses urbanisasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia memicu terjadinya perkembangan spasial kompleks secara internal dan eksternal (Buhaug & Urdal, 2013). Terkonsentrasinya penduduk Indonesia di Pulau Jawa mengarah pada pertumbuhan penduduk di kota-kota besar dan kota-kota kecil, sehingga perkembangan perkotaannya melebar dan terfragmentasi di beberapa wilayah kabupaten sekitarnya (Mardiansyah, 2013; Mardiansyah F.H; Handayani, W & Setyono, J.S, 2018).

Pemerintahan daerah yang optimal biasanya memiliki 5.040 rumah tangga atau 25.000 - 30.000 penduduk (Desky, A.F, 2022), serta fokus pada efisiensi ekonomi, demokrasi, distribusi, dan pembangunan dengan populasi sekitar 1.620 atau lebih 2.000 penduduk (Pawel, 2002). Ukuran optimal pemerintahan daerah di Indonesia diinvestigasikan dengan jumlah

penduduk yang optimal bagi kabupaten/kota dengan meminimalkan pengeluaran per kapita penduduk (Takiro & Subkhan, 2004). Perhitungan ukuran kota/kabupaten optimal didasarkan pada pendekatan minimal pengeluaran per kapita dan pendekatan maksimal PDRB, dengan pengeluaran per kapita yang bersinergi (Nazara & Nurkholis, 2007). Perspektif efisiensi kota optimal berdasarkan hubungan efisiensi produksi dan ukuran populasi (Hitzske, 2014).

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di 7 kota provinsi Sumatera Barat cukup berfluktuasi, sementara luas wilayahnya tetap. Dalam rentang tahun 2020-2022, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di kota Padang dan kota lainnya berfluktuasi, sementara luas wilayahnya tetap. Kota Padang memiliki rata-rata jumlah penduduk per tahun sebesar 913.544 orang, kepadatan penduduk sebesar 1.317 jiwa/km², dan luas wilayah tetap sebesar 693.66 km², sedangkan kota Padang Panjang memiliki rata-rata jumlah penduduk sebesar 57.044 orang, kepadatan penduduk sebesar 2.480 jiwa/km², dan luas wilayah hanya 23 km².

Jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penentu ukuran kota optimal karena pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Binalty, A.O, 2012 & Kukliski, 2015). Pertumbuhan ekonomi kota Padang per tahun cukup berfluktuasi tahun 2018 (6.06%), 2019 (5.65%), 2020 (-1.86%), 2021 (3.66%), 2022 (4.36%). Setiap daerah memiliki masalah pembangunan, tidak semua bisa dihadapi karena kemampuan keuangan daerah terbatas (Lewis, D.B ; Jasmin, C.2014 & Simanjuntak, R.A. 2019). Pemerintah harus menetapkan secara tegas tolok ukur kota optimal berdasarkan kekhasan

daerah dengan identifikasi ekonomi potensial (Friedmann, J ; William A, 2016 ; Higgin, B. & Donald J.S, 2015).

Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Abdullah ; Rusdarti, 2017 & Nurlina, 2015), belanja pemerintah dan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Rosemarina, A.R & Ratu Eva, F, 2019). Berdasarkan fenomena di atas rumusan masalah penelitian bagaimanakah identifikasi ukuran optimal kota Padang provinsi Sumatera Barat berdasarkan sudut pandang ekonomi? Tujuan penelitian identifikasi ukuran optimal kota Padang provinsi Sumatera Barat berdasarkan sudut pandang ekonomi.

Produk Domestik Regional ruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam wilayah domestik atau jumlah hasil seluruh nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (BPS, 2022). Menurut (Paul A.Samuelson; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019) PDRB sebagai indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu menurut Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menggambarkan pendapatan suatu daerah yang dicapai dalam tahun tertentu dan perubahannya berperan penting menentukan pertumbuhan ekonomi (Paul A.Samuelson & William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019).

PDRB adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik WNI dan WNA) dalam suatu negara sebagai ukuran tentang besarnya kemampuan suatu daerah menghasilkan barang/jasa dalam tahun tertentu (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019). Produk

Nasional Bruto (PNB) adalah nilai barang/jasa yang dihasilkan di dalam negara atau di luar negeri yang dilakukan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara (Paul A.Samuelson; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019). Pendapatan nasional dihitung dengan cara pengeluaran, produk neto dan pendapatan (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019).

Kajian empiris ukuran kota optimal tidak hanya dilakukan di negara maju tapi juga di negara berkembang (Arnot, 2004 ; Nazara, 2007 ; Hitzschke, 2022 ; Kim Hewing and Nam, 2013 ; Camagni, Capelo & Caragliu, 2014 ; Marques, Kortt & Dollery, 2015). Ukuran kota optimal sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengendalian urbanisasi, tata ruang wilayah dan arah pembangunan kota jangka panjang (Alonso, 1971), (Cameron & Wingo, 1973), Richardson (1978 & 1983), (Henderson, 1985 & Fujita, 1989). Ukuran kota optimal dilihat dengan pendekatan biaya minimum, pendekatan maksimum manfaat dan pendekatan *marginal cost approach*, penentuan awalnya dilakukan oleh (Alonso, 1971 & Richardson, 1978). Kurva *Average Product (AP)* dan *Marginal Product (MP)* bersifat linier sehingga tidak sesuai dengan kaedah ilmu ekonomi dan kenyataannya di lapangan (Alonso, 1971). Kurva AP dan MP menjelaskan *Average Benefit (AB)* dan *Marginal Benefit (MB)* kota bersangkutan bersifat non linier, awalnya meningkat cepat bila ukuran kota meningkat kemudian berkurang saat kota sudah sangat besar.

Pendekatan biaya minimum berdasarkan pertimbangan bahwa pembangunan kota optimal dari sudut pandang ekonomi dikelola dengan biaya pengelolaan rata-rata minimum secara efektif dan efisien, tercermin dari biaya

pengelolaan minimum. Berdasarkan prinsip ini ukuran kota optimal ditetapkan berdasarkan titik minimum biaya rata-rata pengelolaan kota *Average Cost (AC)* meliputi gaji dan upah aparatur kota, biaya administrasi, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kota. Pendekatan biaya minimum berdasarkan prinsip ekonomi skala besar bahwa ukuran kota dapat diperbesar sampai tercapainya titik biaya pengelolaan rata-rata per kapita minimum. Ukuran kota diperbesar dengan membiarkan jumlah penduduk terus bertambah setelah melewati titik minimum maka biaya pengelolaan rata-rata akan meningkat. Dengan demikian titik biaya minimum sebagai dasar utama penentuan ukuran kota optimal.

Bila manfaat bersih yang dinikmati masyarakat turut diperhitungkan berdasarkan manfaat dan keuntungan yang dinikmati masyarakat kota maka kriteria penentuan kota optimal sebaiknya berdasarkan selisih maksimum kurva AC dan kurva AB merupakan selisih AB dan AC maksimum. Ukuran kota dengan pendekatan ini lebih besar dari ukuran kota optimal berdasarkan prinsip ongkos minimum (Alonso 1971 & Richardson, 1978).

Menurut (Alonso 1971 & Richardson, 1978) keuntungan maksimum diperoleh dalam jangka panjang bila pengusaha memproduksi saat $MC = MP$ untuk kota optimal berdasarkan pertimbangan maksimum keuntungan cukup rendah (mendekati nol). Kriteria ukuran kota optimal (Richardson J.V, 1985) bila $AC = AR$ saat keuntungan sama dengan nol akan relevan untuk jangka panjang bila $MC = MR$ untuk jangka pendek.

Model kota optimal formulasi (Alonso & Richardson, 1978) pada dasarnya sama, bedanya terletak pada bentuk kurva AB, MB dan MC dimana

Alonso mengasumsikan kurvanya linier sedangkan Richardson mengasumsikannya non linier. Kesimpulan yang dihasilkan tetap sama dengan 3 pendekatan pengukuran kota optimal dilihat dari ongkos minimum (sudut pengelola kota), maksimum mafaat bersih (sudut warga kota) dan profit maksimum (sudut pandang bisnis). Hipotesis model Alonso-Richardson menyangkut jumlah penduduk kota optimal dengan pendekatan keuntungan maksimum menghasilkan jumlah penduduk kota yang lebih besar dari pendekatan manfaat bersih dan pendekatan ongkos minimum. Ukuran kota optimal dengan pendekatan maksimum manfaat bersih lebih besar dari jumlah penduduk kota optimal dengan pendekatan ongkos minimum.

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk menetap atau sementara sehingga jumlah penduduk kota meningkat karena peningkatan fertilitas penduduk kota (R. Bintarto, 1984). Para urban yang menetap di kota sesuai kriteria jumlah penduduk sbb : kota kecil 20.000-100.000 orang, kota sedang 100.000-500.000 orang, kota besar 500.000-1.000.000 orang dan kota metropolitan lebih dari 1.000.000 orang (Sujamto, 1991). Korelasi persentase jumlah angkatan kerja dalam kegiatan pertanian dengan persentase penduduk yang tinggal di perkotaan sekitar 0.86 (Davis & Golden, 1954). Dibeberapa negara besar seperti Mesir terjadinya *over urbanization* karena *push factor* dan *pull factor* (Sovani, N.V 1976). Terjadinya *over urbanization* berdampak positif terhadap proses pembangunan dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat sbb : meningkatnya *traffic congestion*, meningkatnya *urban unemployment*, meningkatnya *urban poverty*, meningkatnya *slump areas* dan

meningkatnya kejahatan dan kriminalitas kota ((Sjafrizal, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif bertujuan menggali pengetahuan dan pemahaman untuk menganalisis sebuah fenomena komtemporer historik dengan menganalisis dan menyajikan data secara sistemik sehingga mudah dipahami dan disimpulkan (Cooper, Donal R., Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015). Penelitian menggunakan data sekunder jenis data rasio bersumber dari *library research* diperoleh dari berbagai *literature*, artikel ilmiah, buku, laporan BPS dan berbagai *website* resmi berhubungan dengan masalah penelitian. Populasi yaitu semua variabel menyangkut masalah yang diteliti dan sampel yaitu sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti mewakili semua populasi (Cooper, Donal R., Pamela S.C, 2011 & Sekaran 2015). Populasi penelitian 12 kabupaten, 7 kota dan sampel penelitian kota Padang provinsi Sumatera Barat ditentukan secara *purposive sampling* (Cooper, Donal R, & Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015).

State of the art cukup penting dalam penelitian karena bermanfaat untuk mengetahui perkembangan sebuah ilmu. *State of art* yaitu rancangan penelitian dibandingkan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian (Husein Umar, 2013) *state of the art* sbb :

1. Ukuran kota optimal kabupaten dan kota Indonesia berdasarkan pendekatan minimisasi dan pengeluaran per kapita, menggunakan metode translog kuadrat variabel dummy (Suahasil N.N, 2007).
2. Ukuran kota optimal kota Bukittinggi berdasarkan pendekatan efisiensi produktifitas kota dan biaya pengelolaan kota, menggunakan

metode regresi non linier kuadratik (Andreas M.J.S, 2016).

3. Ukuran optimal kota-kota di Indonesia berdasarkan data sekunder, menggunakan analisis deskriptif (Aprilia P & Abd.Jamal, 2017).
4. Ukuran optimal kota Bukittinggi berdasarkan konsep ekonomi, menggunakan model Alonso (Zul Azhar, 2018).

Metode pengolahan dan analisis data bersifat statistik deskriptif kuantitatif karena peneliti ingin mengeksplor berbagai fenomena sekelompok unit analisis dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami melalui data populasi atau sampel (Cooper, Donal R, ; Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015). Ukuran kota optimal menjelaskan pendekatan *net benefit* suatu kegiatan sebagai nilai produksi (pendapatan) dikurangi total biaya pengeluaran ((Richardson, 1983). Kepadatan penduduk kota optimal ditentukan dengan menyamakan turunan pertama persamaan AC, cari jumlah penduduk kepadatan penduduk saat kedua turunan sama. Secara rinci metode pengolahan dan analisis data dibagi atas 2 bagian :

1. Pendekatan Minimisasi Pengeluaran per Kapita

Formulanya $PLNKAP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 POP_{it} + \alpha_2 POP_{it}^2 + \alpha_3 LW_{it} + \alpha_4 LW_{it}^2 + \alpha_5 PDRBBKAP_{it} + e_{it}$ dan $Ln(PE_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(POP_{it}) + \beta_2 \ln(POP_{it})^2 + \beta_3 \ln(LW_{it}) + \beta_4 \ln(LW_{it})^2 + \beta_5 \ln(POP_{it}) \ln(LW_{it}) + \beta_6 \ln(PDRBBKAP_{it}) + e_{it}$ dimana dimana $\alpha_0, \beta_0 =$ konstanta, $PLNKAP =$ pengeluaran total pemerintah daerah per kapita, $PDRBBKAP =$ PDRB per kapita, $POP =$ jumlah penduduk wilayah, $LW =$ luas wilayah, $\alpha_1, \beta_1 \dots$ dan $e = error term$.

2. Pendekatan Maksimisasi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita
 - a. Maksimisasi Pertumbuhan Ekonomi

Formulanya $PE_{it} = a_0 + a_1 POP_{it} + a_2 POP_{it}^2 + a_3 LW_{it} + a_4 LW_{it}^2 + a_5 GS_{it} + e_{it}$ dan

$$Ln(PE_{it}) = b_0 + b_1 \ln(POP_{it}) + b_2 \ln(POP_{it})^2 + b_3 \ln(LW_{it}) + b_4 \ln(LW_{it})^2 + b_5 \ln(POP_{it}) \ln(LW_{it}) + b_6 \ln(GS_{it}) + e_{it}$$

- b. Maksimisasi PDRB per Kapita

Formlanya $PDRBBKAP_{it} = c_0 + c_1 POP_{it} + c_2 POP_{it}^2 + c_3 LW_{it} + c_4 LW_{it}^2 + c_5 GS_{it} + e_{it}$ dan $Ln(PDRBBKAP_{it}) = d_0 + d_1 \ln(POP_{it}) + d_2 \ln(POP_{it})^2 + d_3 \ln(LW_{it}) + d_4 \ln(LW_{it})^2 + d_5 \ln(POP_{it}) \ln(LW_{it}) + d_6 \ln(GS_{it}) + e_{it}$ dimana $a_0, b_0, c_0, d_0 =$ konstanta, $PE =$ pertumbuhan ekonomi, $PDRBBKAP =$ PDRB per kapita, $GS = government size$, $POP =$ jumlah penduduk wilayah, $LW =$ luas wilayah, $a_1, b_1, c_1, d_1 =$ koefisien variabel dan $e = error term$.

Titik minimum pengeluaran per kapita berkaitan langsung dengan jumlah penduduk dicari dengan persamaan $\partial PLNKAP / \partial POP = \alpha_1 + 2\alpha_2 POP$ dan nilai minimum pengeluaran per kapita dihitung $\alpha_1 + 2\alpha_2 POP = 0$ dan $POP^* = -\alpha_1 / 2\alpha_2$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Variabel Penelitian

Konsumsi penduduk suatu daerah cerminan kondisi sosial ekonomi daerah, acuan dalam memprediksi indikator kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk secara ekonomi diukur dengan menghitung besar pengeluaran seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi konsumsi makanan dan bukan makanan dalam waktu tertentu. Bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan turun dengan meningkatnya pendapatan (Engel, 1857) sejalan dengan teori (Maslow, 1943) bahwa manusia

termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari yang paling rendah kebutuhan *basic need* sampai paling tinggi kebutuhan aktualisasi diri. Rata-rata pengeluaran total per kapita kota Padang selama 5 tahun Rp14.583 (ribu) dan provinsi Sumatera Barat Rp 10.985 (ribu), tahun 2018 tidak tersedia data. Pengeluaran total per kapita kota Padang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran total per kapita provinsi Sumatera Barat. Nilai PDRB ADHB tahun dasar 2010 kota Padang menurut lapangan usaha penyumbang perekonomian terbesar di provinsi Sumatera Barat Rp 62.424.554.79 triliun tahun 2020, setara 25.7% dari total PDRB 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat Rp 241.88 triliun. Kota Padang tahun 2022 PDRB berdasarkan ADHB 2010 Rp 72.961.63 turun Rp 65.106.509.36 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 65.179.471.01. Naiknya PDRB ADHB 2010 pengaruhi oleh kenaikan produksi di semua lapangan usaha karena adanya inflasi. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Jumlah penduduk kota Padang setiap tahunnya relatif meningkat, dalam pembangunan kependudukan salah satu aspek penting paling mendasar dalam pembangunan. Penduduk sebagai sasaran dan pelaku pembangunan juga sebagai orang yang menikmati pembangunan. Tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi kota Padang drastis turun masing-masing 5.65% dan -1.86% karena pandemi covid 19 berdampak terhadap semua lapangan usaha dan sektor unggulan kota Padang. Pertumbuhan ekonomi kota Padang tahun 2023 ditargetkan 5.03% laju inflasi 0.14% dan pengangguran terbuka

9.74% dari angkatan kerja. Tingkat kemiskinan berkisar di bawah angka 4.30% disertai Indeks Pembangunan Manusia 83.82% sehingga dengan mulai pulihnya ekonomi diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Tahun 2023 mendatang pendapatan daerah diprediksi Rp 2.513 triliun turun Rp 128.7 milyar atau 4.87% dibandingkan tahun 2022 pendapatan daerah Rp 2.642 triliun. Rencana pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 928.65 milyar, pendapatan transfer Rp 1.57 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang syah Rp 15 milyar.

Government size sebagai ukuran kontribusi pemerintah dalam pembangunan suatu negara termasuk pembelian barang, jasa publik dan perlindungan sosial bagi masyarakat (OECD, 2005). *Government size* diukur dengan persentase total pengeluaran pemerintah dari GDP bisa juga diukur dari rasio pajak yaitu persentase total penerimaan pajak dari GDP (Santika & Qibthiyah, 2020). *Government size* merupakan gambaran kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah suatu negara menggunakan data persentase pengeluaran pemerintah terhadap GDP. Pemerintah kota Padang tahun 2018-2022 rata-rata anggaran belanja Rp 251.634.339.335.4 realisasi belanja Rp 178.594.559.852.4 dan pangsa realisasi 86.43%. Kebijakan pengeluaran pemerintah fokus kepada fasilitas umum, bantuan anggaran untuk daerah dan peningkatan belanja perlindungan sosial. Pemanfaatan pengeluaran pemerintah memberikan fasilitas bisnis yang memadai akan menciptakan sistem kelembagaan yang baik dan menarik investasi untuk pembangunan (Otman, et.al., 2018). Saat jumlah *government size* optimal maka peningkatan *government size* tidak berdampak signifikan dan berkorelasi negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi (Asimakopoulus & Karavias, 2016). Bila *government size* di atas titik optimal menimbulkan efek *crowding out* investasi (Olaoye et al, 2020) karena peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan defisit cukup besar, sementara defisit dibiayai dengan utang sehingga tekanan kredit dan suku bunga riil naik.

Pendekatan Minimisasi Pengeluaran per Kapita

Pendekatan ini menggunakan regresi terhadap pengeluaran total per kapita = PLNKAP, pengeluaran rutin per kapita = PLNRKAP, pengeluaran pembangunan per kapita = PLNPKAP, pengeluaran total pendidikan SPM per

kapita = SPMKAP, pengeluaran pendidikan per kapita = PDKNKAP, pengeluaran kesehatan per kapita = KSHTNKAP dan pengeluaran infrastruktur dasar per kapita = INFRAKAP). Ukuran optimal sebuah daerah sebaiknya dilakukan setiap tahun dan semua tahun (Akita & Subkhan, 2004) juga menggunakan indikator kepadatan penduduk sebagai rasio jumlah penduduk dengan luas wilayah (Swianniewicz, 2002). Hasil pengolahan data menggunakan fungsi translog untuk pengeluaran pemerintah kota Padang per kapita, pengeluaran total, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sesuai dengan model (Deler et al., 1998) seperti tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Regresi Fungsi Translog Pengeluaran Pemerintah Kota Padang per Kapita

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Variabel bebas	LnPLNKAP (Total per Kapita)	LnPLNRKAP (Rutin per Kapita)	LnPLNPKAP (Pembangunan per Kapita)
Konstanta	7.863155	6.205657	7.603985
t hitung	(11.73)	(9.32)	(10.19)
LnPOP	-0.912621	-0.707410	-1.820415
t hitung	(-3.41)	(-2.17)	(5.41)
(LnPOP) ²	0.037521	0.046984	0.046894
t hitung	(3.47)	(1.39)	(3.58)
LnLW	0.217639	0.274497	0.350128
t hitung	(2.86)	(3.56)	(3.52)
(LnLW) ²	-6.61E-05	-0.000483	0.014118
t hitung	(-0.01)	(-0.13)	(2.47)
LnPOP*LnLW	-0.042724	-0.035798	-0.054735
t hitung	(-3.20)	(-2.31)	(-2.47)
LnPDRBBKAP	0.500194	0.301230	0.487748
t hitung	(13.68)	(9.27)	(10.03)
R ²	0.519	0.408	0.611
Adj.R ²	0.79	0.236	0.593
F Statistic	456.299	196.637	436.180
Prob.(F Stat)	0.000	0.000	0.000
t tabel	2.063	1.671	1.671

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil regresi fungsi translog menggunakan fungsi kuadratik menunjukkan semua variabel bebas signifikansi $\alpha = 5\%$ mempengaruhi

pengeluaran pemerintah per kapita untuk pengeluaran total, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan seperti tabel 2.

Tabel 2.
Hasi Regresi Fungsi Kuadratik Pengeluaran Pemerintah Kota Padang per Kapita

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3	Persamaan 4
Variabel bebas	PLNKAP (Total per Kapita)	PLNKAP (Total per Kapita)	PLNRKAP (Rutin per Kapita)	PLNPKAP (Pembangunan per Kapita)
Konstanta	802.7297	526.4094	244.95844	129.1239
t hitung	(20.18)	(10.81)	(12.21)	(2.43)
POP	-1.120257	-1.072461	-0.417950	0.289801
t hitung	(-12.51)	(-12.54)	(-11.62)	(-7.06)
POP ²	0.000326	0.000237	0.000141	7.84E-05
t hitung	(8.09)	(9.30)	(8.85)	(6.44)
LW	0.013953	0.024040	0.028818	0.015960
t hitung	(4.05)	(4.45)	(3.24)	(3.14)
LW ²	-2.15E-05	-2.58E-05	-5.17E-04	-1.32E-05
t hitung	(-3.36)	(-4.39)	(-2.68)	(-2.39)
PDRBBKAP	9.279226	8.548898	1.486898	4.566966
t hitung	(4.68)	(4.51)	(2.41)	(3.73)
R ²	0.322	0.475	0.442	0.322
Adj.R ²	0.313	0.404	0.380	0.313
F Statistic	176.312	144.776	125.146	76.975
Prob.(F Stat)	0.000	0.000	0.000	0.000
t tabel	2.063	1.671	1.671	1.671

Sumber: Data Diolah, 2023

Koefisien LW = Luas Wilayah hasilnya positif signifikan menunjukkan semakin luas wilayah kota Padang maka pengeluaran pemerintah per kapita semakin besar. Hubungan luas wilayah dengan pengeluaran pemerintah per kapita tidak linier, negatif signifikan sesuai nilai LW² sehingga hubungannya berbentuk kurva U terbalik. Hasil perhitungan ukuran optimal kota Padang menggunakan koefisien POP dan POP² seperti tabel 3, tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 3.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran Pemerintah Total per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.124	0.00011	939.112
2019	-0.217	0.00013	950.87
2020	-1.456	0.00027	909.040
2021	-1.518	0.00039	913.448
2022	-1.283	0.00046	919.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 4.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran Rutin per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.137	0.00011	939.112
2019	-0.158	0.00013	950.87
2020	-1.571	0.00027	909.040
2021	-1.418	0.00039	913.448
2022	-1.283	0.00046	919.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 5.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran Pembangunan per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.124	0.00011	939.112
2019	-0.217	0.00013	948.87
2020	-1.456	0.00027	909.040
2021	-1.518	0.00039	913.448
2022	-1.283	0.00046	919.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Ukuran optimal kota Padang menggunakan pendekatan minimisasi pengeluaran per kapita dianalisis sesuai jenis pengeluaran Standar Pelayanan Minimum (SPM) menurut klasifikasi anggaran dan anggaran pembangunan. Hasil regresi translog dan fungsi kuadratik untuk persamaan anggaran SPM per kapita, pengeluaran pendidikan per kapita, pengeluaran kesehatan per kapita dan pengeluaran infrastuktur dasar perkapita hasilnya hampir sama dengan hasil regresi fungsi translog sebelumnya yang dilakukan untuk pengeluaran total per kapita, pengeluaran rutin per kapita dan pengeluaran pembangunan per kapita seperti tabel 6, tabel 7, tabel 8 dan tabel 9.

Tabel 6.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran SPM per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.021	0.00010	929.112
2019	-0.040	0.00011	950.87
2020	-0.13	0.00020	930.040
2021	-0.157	0.00051	900.448
2022	-0.153	0.00037	914.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 7.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran Pendidikan per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.011	0.00007	966.112
2019	-0.014	0.00010	960.87
2020	-0.026	0.00019	920.040
2021	-0.045	0.00027	894.448
2022	-0.012	0.00034	879.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 8.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran Kesehatan per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.015	0.00005	987.112
2019	-0.016	0.00009	970.87
2020	-0.020	0.00018	915.040
2021	-0.022	0.00025	873.448

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2022	-0.033	0.00032	866.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 9.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan Pengeluaran Infrastruktur Dasar per Kapita

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.013	0.000015	998.112
2019	-0.011	0.000013	981.87
2020	-0.132	0.000037	928.040
2021	-0.126	0.000041	897.448
2022	-0.138	0.000074	905.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Pendekatan Maksimisasi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi fungsi translog pertumbuhan ekonomi seperti tabel 10.

Tabel 10.
Hasil Regresi Fungsi Translog Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang

Variabel	Persamaan 1		Persamaan 2	
	Variabel bebas	LnPE	Variabel bebas	LnPE
Konstanta	1.135667	2.005365		
t hitung	(2.38)	(2.25)		
LnPOP	-0.320454	-0.413463		
t hitung	(-1.31)	(-1.42)		
(LnPOP) ²	0.024217	0.037458		
t hitung	(2.17)	(2.11)		
LnLW	0.010473	0.034865		
t hitung	(0.36)	(0.51)		
(LnLW) ²	0.004665	-0.000483		
t hitung	(1.52)	(1.27)		
LnPOP*LnLW	-0.012757	-0.035798		
t hitung	(-2.30)	(-1.29)		
LnGS	-0.035838	-		
t hitung	(-2.03)			
LnGS ₁	-	-0.105069		
t hitung		(-2.73)		
LnGS ₂	-	0.002010		
t hitung		(0.07)		
R ²	0.031	0.024		
Adj.R ²	0.026	0.0260		
F Statistic	7.499	6.733		
Prob.(F Stat)	0.000	0.000		
t tabel	2.063	1.671		

Sumber: Data Diolah, 2023

Koefisien variabel LnGS pada tabel 10 hasilnya negatif signifikan artinya bila perubahan rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ADHB

meningkat maka pertumbuhan ekonomi turun. Hal ini terjadi diduga karena pemerintah kota Padang melakukan ekspansi kegiatan sebagai regulator penyedia barang pelayanan publik tertentu sehingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel 10 menunjukkan pengeluaran rutin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 11 hasil regresi fungsi kuadratik menunjukkan LW, DB, DMKR dan DD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien variabel LW hasilnya negatif menunjukkan semakin luas sebuah kota maka pertumbuhan ekonominya kecil karena luas wilayahnya tidak produktif menghasilkan *output* bagi perekonomian daerahnya sehingga menjadi beban anggaran bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan anggaran lebih besar dalam pembangunan infrastruktur.

Tabel 11.
Hasil Regresi Fungsi Kuadratik Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Variabel terikat	PE	PE	PE
Konstanta	3.132982	3.031362	0.449586
t hitung	(5.88)	(4.36)	(0.44)
POP	-0.001271	-0.001236	0.000210
t hitung	(-1.21)	(-1.19)	(0.25)
POP ²	1.36E-05	2.01E-05	-1.28E-05
t hitung	(0.45)	(0.40)	(-0.37)
LW	-0.000143	0.000172	-0.000131
t hitung	(-1.42)	(-1.49)	(-1.18)
LW ²	3.03E-08	1.00E-07	4.40E-08
t hitung	(0.42)	(1.36)	(1.27)
GS	1.122851	-	-2.002270
t hitung	(1.74)		(-1.23)
GS ₁	-	3.124759	-
t hitung		(0.72)	
GS ₂	-	0.026586	
t hitung		(0.01)	
R ²	0.011	0.012	0.039
Adj.R ²	0.008	0.009	0.035

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
F Statistic	4.504	3.411	8.318
Prob.(F Stat)	0.000	0.000	0.000
t tabel	2.063	1.671	2.063

Sumber: Data Diolah, 2023

Pemodelan dengan pendekatan maksimisasi pertumbuhan ekonomi menentukan ukuran kota optimal dapat juga dilakukan dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kinerja perekonomian daerah. Menurut (Handler et al., 2005) hubungan kinerja perekonomian dengan ukuran pemerintah daerah menunjukkan hubungan tidak linier dan negatif bila pemerintah daerah melebihi ukuran kota optimal (berbentuk kurva U terbalik). Hampir sama dengan model yang digunakan untuk mengukur keefektifan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan pelayanan publik terhadap masyarakat menggunakan ukuran pemerintah daerah berupa rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB atau *government size*. Pemerintah daerah akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, dapat di *proxy* sebagai variabel pengeluaran *agregate* dan pengeluaran sektoral sebagai indikator *government size* dengan berbagai variabel sosial ekonomi daerah lainnya seperti jumlah penduduk. *Government size* signifikan dipengaruhi oleh variabel penerimaan pemerintah, jumlah penduduk dan kebijakan desentralisasi fiskal yang digunakan (Syahril Syarif, 2005).

Pendekatan Maksimisasi PDRB per Kapita

Ukuran optimal kota menggunakan pendekatan maksimisasi dengan indikator pertumbuhan ekonomi hasilnya kurang baik sehingga indikator pertumbuhan ekonomi diganti dengan indikator PDRB per kapita ADHB. Hasil pengolahan datanya seperti tabel 12.

Tabel 12.
Hasi Regresi Fungsi Translog PDRB per Kapita ADHB Kota Padang

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2
Variabel bebas	LnPDRBBKAP	LnPDRBBKAP
Konstanta	1.308044	1.458701
t hitung	(3.26)	(2.46)
LnPOP	-0.417963	-0.518764
t hitung	(-2.29)	(-2.16)
(LnPOP) ²	0.067877	0.057764
t hitung	(4.00)	(3.80)
LnLW	0.110427	0.142422
t hitung	(1.55)	(1.72)
(LnLW) ²	0.022338	0.029272
t hitung	(4.07)	(3.57)
LnPOP*LnLW	-0.047974	-0.058676
t hitung	(-6.42)	(-5.73)
LnGS	-0.331875	-
t hitung	(19.71)	-
LnGS ₁	-	-0.354976
t hitung	-	(-9.63)
LnGS ₂	-	-0.062492
t hitung	-	(-2.45)
R ²	0.381	0.418
Adj.R ²	0.379	0.415
F Statistic	210.611	170.212
Prob.(F Stat)	0.000	0.000
t tabel	2.063	1.671

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 13.
Hasi Regresi Fungsi Kuadratik PDRB per Kapita ADHB Kota Padang

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
Variabel terikat	PDRBBKAP	PDRBBKAP	PDRBBKAP
Konstanta	11.229722	10.37978	9.46845
t hitung	(6.24)	(5.33)	(6.24)
POP	-0.051161	-0.103707	-0.004640
t hitung	(-3.14)	(-2.39)	(-3.01)
POP ²	2.62E-04	2.36E-04	1.44E-04
t hitung	(3.67)	(3.01)	(3.81)
LW	0.000101	0.000133	0.000983
t hitung	(2.52)	(1.66)	(5.33)
LW ²	-1.32E-07	-1.12E-07	-2.60E-07
t hitung	(-2.31)	(-1.52)	(-4.21)
GS	-19.76686	-	-25.50989
t hitung	(-4.14)	-	(-4.52)
GS ₁	-	-24.57423	-
t hitung	-	(-3.63)	-
GS ₂	-	2.616816	-
t hitung	-	(0.61)	-
R ²	0.057	0.062	0.140
Adj.R ²	0.005	0.058	0.136
F Statistic	24.927	18.208	33.376
Prob. (F Stat)	0.000	0.000	0.000

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2	Persamaan 3
t tabel	2.063	1.671	2.063

Sumber: Data Diolah, 2023

Koefisien variabel LW positif signifikan berarti semakin luas sebuah wilayah maka semakin besar nilai PDRB per kapita. Koefisien LW² negatif signifikan berarti pengaruh variabel LW² tidak dapat digunakan untuk perhitungan ukuran optimal sebuah kota karena ketidakstabilan. Variabel POP dan POP² tidak signifikan menunjukkan perhitungan ukuran kota optimal kota Padang tidak dapat dihitung. Hasil perhitungan ukuran kota optimal berdasarkan PDRB per kapita ADHB sebagai ukuran optimal jumlah penduduk agar PDB per kapita meningkat seperti tabel 14.

Tabel 14.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan PDRB per Kapita ADHB Kota Padang

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.0011	0.0000013	998.112
2019	-0.0020	0.0000114	981.87
2020	-0.0101	0.0000025	928.040
2021	-0.0035	0.0000116	897.448
2022	-0.0036	0.0000110	905.145

Sumber: Data Diolah, 2023

Angka tersebut hampir mirip dengan hasil perhitungan berdasarkan pendekatan minimisasi pengeluaran total per kapita. Bila hasil perhitungannya digabung secara bersama-sama akan saling berkolaborasi dengan hasil pengukurannya seperti tabel 15.

Tabel 15.
Ukuran Optimal Kota Padang Berdasarkan PDRB per Kapita dan Pengeluaran per Kapita Minimal Kota Padang

Tahun	Koefisien POP	Koefisien POP ²	Nilai POP (Orang)
2018	-0.0011	0.0000013	998.112
2019	-0.0020	0.0000114	981.87
2020	-0.0101	0.0000025	928.040
2021	-0.0035	0.0000116	897.448
2022	-0.0036	0.0000110	905.145

Sumber: Data Diolah, 2023

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk kota Padang berdasarkan ukuran skala ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan hubungan negatif signifikan antara jumlah penduduk dengan setiap anggaran pengeeluaran pemerintah kota per kapita.
- 2) Hasil perhitungan ukuran kota optimal menggunakan pendekatan minimisasi pengeluaran per kapita dan pendekatan maksimisasi PDRB per kapita menunjukkan bahwa jenis pengeluaran per kapita kota Padang tidak sama setiap waktu.
- 3) Ukuran kota optimal yang cocok dapat minimal bertujuan agar nilai PDRB kota Padang meningkat.

Saran yang dapat diberikan sesuai hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut :

- 1) Perlu pelaksanaan reformasi pemerintah kota untuk menentukan ukuran optimal kota Padang.
- 2) Perlu kerjasama antar pemerintah kota terkait ukuran optimal kota dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

DAFTAR PUSAKA

- Asimakopoulos, S., & Karavias, Y. 2016. The Impact of Government Size on Economic Growth. A Threshold Analysis. *Economics Letter*. Vol. 139. p:65-68.
- Azhar, Zul. 2018. Analisis Ukuran Kota Optimal Suatu Strategi Perencanaan Pengembangan Kotamadya Bukittinggi. *Thesis*. Universitas Andalas.
- Abdullah, Mahmoud Ahmed & Rusdarti. 2017. The Impact of Government Expenditure on

Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*. Vol.6(1). p:11-18.

- Adisasmita, H.Rahardjo. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Akita, Takahiro dan Subhan. *The Optimal Size of Local Government and Fiscal Decentralization. Proceeding International Seminar 6th Indonesian Regional Science Association*. Yogyakarta, Agustus 2004.
- Alonso, William. 1964. *Location and Land Use : Toward a General Theory of Land Rent*. Cambridge : Harvard University Press.
- Andreas, May J.S. 2016. Analisis Ukuran Optimal Kota Bukittinggi Menggunakan Pendekatan Manfaat Bersih Maksimum. *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Andalas.
- Arnott, Richard, J and R.Stiglitz. Agregate Land Rents, Expenditure on Public Goods and Optimal City Size. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 18. p:471-500
- Badan Pusat Statistik Berbagai Edisi. 2022. *Sumatera Barat Dalam Angka*. Padang : BPS.
- Binalty, A.O. 2012. Growth and Income Equality: A Comparative Analysis. *Economics Research International*. 12(2). <https://doi.org/10.1155/2012/5698>
- Buhaug, H., & Urdal, H. 2013. An Urbanization Bomb? Population Growth and Social Disorder in Cities. *Global Environmental Change*. Vol. 23. <https://org.doi:10.1016/j.gloenvcha.2012.10.016>.

- Camagni, R.R Capello and A.Caragliu. 2013. One or Infinite Optimal City Size? : In Search of an Equilibrium Size for Cities. *Anual of Regional Science*.
- Cameron, G.C and L.Wingo. 1973. *Cities, Regions and Public Policy*. Edinburg : Oliver and Boyd.
- C. Jotin, Khisty & B.Kent Lall. 2003. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1 Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Davis, K. The origin and Growth of Urbanization in the World. 1995. *Journal World Urbanism*. Vol. 60(5). p:429-437.
- Davis, K and Hilda H.Golden. 1954. Urbanization and the Development of Pre-Industrial Area. *Journal Economic Development and Cultural Change*. Vol.3(1).
- Desky, Ahmed F. 2022. *Buku Diktat Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. UIN Sumatera Utara.
- Fiedmann, J & William, A. 2016. *Regional Policy : Readings in Theory and Applications*. Cambridge : The M.I.T. Press.
- Fujita, Masahisa. 1989. *Urban Economic Theory : Land Use and City Sizes*. Cambridge : University Press.
- Handler, et al.,The Impact of Public Budgets on Overall Productivity Growth. *WIFO Working Papers* No.255, Agustus 2005.
- Harahap, Fitri, R. 2013. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Jurnal Society*.Vol. 1(1). p:1-11.
- Henderson, J.V. 1985. *Economic Theory and the Cites*. Orlando : The Academic Press.
- Hidayati, Inayah. 2021. Urbanisasi dan Dampak Sosial Di Kota Besar : Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 7(2). p:41-50.
- Hitzschke, Stephan. 2011. *The Optimal Size of German Cities : An Efficient Analysis Perspective*. New York : McGraw-Hill.
- Kim, E.G.Hewings and K.Nam. Optimal Urban Population Size: National vs Local Economi Efficiency. *Journal Urban Studies*. Vol.51. p:428-445.
- Lewis, D.B. & Jasmin C. 2014. Central Development Spending in Regions Post Decentralization. *BIES*. 40(3). p: 379-394.
- Mankiw, N.Gregory. 2019. *Essential of Economics*. 9th ed. Boton : Cengage Learning.
- Mardiansyah, F.H. 2013. *Urbanisation Durable des Teoritites et Polidiques de Development Urbain en Indonesia : Etude de Trois Kabupaten en Voice d'Urbanisation Rapede dans Lile de Java*. University of Paris-Esat.
- Mardiansyah, F.H & Handayani, W & Setyono, J.S. 2018. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya Pada Kawasan Metropolitan Surakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Vol. 6(3). p:215-233.
- Maslow, Abraham H. 1943. Motivation and Personality (Diteremahkan oleh Nurul Iman). Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Merli, P.,& Choay, F. 2005. *Dictionaire de l'amenagement*. Paris : Quadriga/Manuel.
- Nazara, S dan Nurkholis. 2007. Ukuran Optimal Pemerintah Daerah Di Indonesia : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kota Dalam Era Desentralisasi . *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol.VII(2). p:129-157.
- Nurlina. 2015. The Effect of Government Expenditures on Indonesia Economic Growth. *Journal of Economics, Business and Accountacy Ventura*. Vol.18(1). p:1-14.

- <https://dx.doi.org/10.14414/ebav.v18i1.377>
- Olaoye, O.O., Eluwole, O.O., Ayesha. A & Afolabi, O.O. 2020. Government Spending and Economic Growth in Ecowas : An Asymmetric Analysis. *The Journal of Economics Asymmetric*. Vol. 22. Organization for Economics Cooperation and Development. 2005. *OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance*. Organization for Economics Cooperation and Development.
- Purnama A., & Abdul, J. 2017. Analisis Ukuran Kota Optimal (Studi Kasus Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FEB Unsyiah*. Vol. 2(4). p:500-508.
- R.Bintarto. 1984. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Richardson, Harry W. 1978. The State of Regional Economics: A Review Article. *Journal International Regional Science Review*. Vol.31.
- Richardson, Harry W 1983. *The Economics of Urban Size*. London : Saxon House.
- Rosemarina, Anggraini R & Ratu Eva. 2020. Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Sumatera. *Jurnal Pareto : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.3(1). p:1-20.
- Samuelson & William D.Nordhaus. 2009. *Macroeconomics*. New York : McGraw Hill.
- Santika, A.R., & Qibthiyah, R.M 2020. Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol.20(2). p:1-20.
- Sato, Y.,&Yamamoto, K. 2015. Population Concentration, Urbanization and Demographic Transition. *Journal of Urban Economics*. Vol. 58. p:212-230. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.975>
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syarif, Syahrial. 2005. Fiscal Decentraliation and Government Size: The Case of Indonesia. *Journal Economic and Finance in Indonesia*. Vol.53(2). p:177-193.
- Sovani, N.V.1976. *Analysis of Over Urbanization. Regional Policy : Reading in Theory and Application*. Cambridge : The MIT Press.
- Steering Committe on Local Regional Democracy (CDLR), 2001. Relationship Between the Size of Local and Regional Authorities and Their Effectiveness and Economy of Their Action, Council of Europe, Budapest, Hungary.
- Swianiewicz, Pawel. 2002. *Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Government in Central and Eastern Europa*. Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Institute (OSI). Budapest, Hungary.
- Suparmoko. 2013. *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE.
- Sujamto. 1991. *Cakrawala Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Swianiewicz, Pawel. 2002. Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Government in Central and Eastern Europe, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute (OSI), Budapest, Hungary.
- Takio Akita & Subkan. The Optimal Size o Local Government and Fiscal Decentralization in Indonesia. *Prosiding International 6th Indonesia Regional Science Association (IRSA)*. Yogyakarta. Agustus 2004.
- Tisdale, H. 1942. The Process of Urbanization. *Journal Social Forces* Vol. 20(3). <https://doi.org.10.2307/3005615>.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta : Rajawali.
- World Bank. 2022. <https://www.worldbank.org>